

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS  
SEKOLAH DI SMP NEGERI 2 WONOGIRI**

**ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH**

Diajukan Kepada  
Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Pendidikan



Oleh :

**IKHWAN SANTOSO**

**NIM. Q. 100 100 248**

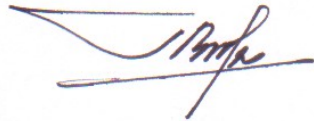
**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2013**

**ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH**

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS  
SEKOLAH DI SMP NEGERI 2 WONOGIRI**

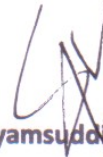
**Telah disetujui oleh:**

**Pembimbing I**



**Dr. Tjipto Subadi, M.Si**

**Pembimbing II**



**Drs. Syamsuddin, MM.**

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS  
SEKOLAH DI SMP NEGERI 2 WONOGIRI**

Oleh:

**Ikhwan santoso<sup>1</sup>, Tjipto Subadi<sup>2</sup>, Syamsuddin<sup>3</sup>**

**Mahasiswa UMS Surakarta<sup>1</sup>, Staf Pengajar UMS Surakarta<sup>2</sup>, Staf Pengajar UMS  
Surakarta<sup>3</sup>**

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to describe (1) the role of the school committee of management of educational facilities. (2) the role of the school committee in the administration of education management. (3) the role of the school in the education finance committee . This type of research is a qualitative study research approach is phenomenological perspective. The study was conducted at SMP Negeri 2 Wonogiri. Techniques of data collection using observation or documentation and in-depth interviews. Data analysis with qualitative descriptions of data reduction, data display and conclusion drawing / verification. The results showed that (1) the role of the school committee of management of the existing facilities and infrastructure that gives consideration ( advisory agency) to give consideration in planning infrastructure needs, provision of facilities and infrastructure procurement accountability preparation facilities and infrastructure, the implementation of maintenance and repair of facilities and infrastructure. (2) The role of the committee of management of the school in education include participation in the preparation of the annual program. Providing inputs related to extracurricular activities to foster student creativity level. Active role in the school committee to supervise the implementation of education. The school committee also has an active role in the mid-term evaluation of learning activities , semester , class promotion test, and final exam. (3) The role of the school in the education finance committee began the school committee was formed. Providing inputs in the preparation of the plan and budget well RAPBS budget plan for school development. Seek funding sources other than the government for the development of the school. To supervise the use of funds derived from the public especially. To supervise the use of the budget from the planning to the implementation of the use of the cost of education.

Keywords: management education, infrastructure, finance, school committee

**PENDAHULUAN**

Peran serta masyarakat merupakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diwujudkan dalam wadah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Agar peran serta masyarakat tersebut dapat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan maka dewan Pendidikan dan Komite Sekolah perlu diberdayakan untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal.

Secara kualitatif, keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Madrasah memang belum sepenuhnya dapat mendorong peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Salah satu penyebabnya antara lain karena masih rendahnya pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan tentang kedudukan, peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Terkait dengan peran komite sekolah, banyak pihak masih meragukan peran komite sekolah. Bahkan, peran komite sekolah dianggap masih lemah. Di berbagai daerah di Indonesia, banyak pihak yang menemukan lemahnya kinerja komite sekolah. Seperti yang diutarakan oleh Muzirman (2007: 1), "masalah pendidikan masih terus menjadi dilema di tengah-tengah masyarakat, permasalahan di dunia pendidikan terletak pada lemahnya kinerja komite sekolah, khususnya dalam hal melakukan pengawasan dan peningkatan mutu pendidikan di sejumlah sekolah". Kinerja komite sekolah yang buruk dipandang sebagai indikator menurunnya kualitas pendidikan. Lemahnya peran komite sekolah ini terkait dalam menjalankan tugas sebagai". badan pertimbangan (*advisory*), pendukung (*supporting*), dan sekaligus mengontrol (*controlling*). Kinerja komite sekolah masih variatif. Menurut Suparlan (2007: 2) kinerja komite sekolah masih berada pada kontinum dari "sebagai stempel" sampai "sebagai eksekutor

Peran komite sekolah di SMP Negeri 2 Wonogiri dilihat secara sepintas telah menunjukkan kinerja yang baik, hal ini terlihat dari kerjama sekolah dengan komite sekolah telah terjalin dengan baik, program-program setiap kegiatan telah dijalankan berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun, komite sekolah terlibat langsung dalam manajemen sarana dan prasarana, manajemen pendidikan dan pembiayaan, sehingga peran komite sekolah telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun peran komite tersebut tidak seluruhnya dilakukan oleh seluruh anggota komite sekolah, artinya semua komite sekolah yang telah terbentuk tidak semuanya bekerja secara aktif. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti akan

mengkaji lebih jauh tentang peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri 2 Wonogiri.

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui Peran Komite Sekolah Dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 2 Wonogiri. Sedangkan tujuan yang lebih khusus dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan peran komite sekolah dalam penyelenggaraan manajemen sarana dan prasarana pendidikan di SMP Negeri 2 Wonogiri. (2) Untuk mendeskripsikan peran komite sekolah dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan di SMP Negeri 2 Wonogiri. (3) Untuk mendeskripsikan peran komite sekolah dalam pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Wonogiri.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan, pendekatan yang digunakan adalah perspektif fenomenologi dengan paradigma definisi sosial yang bergerak pada kajian mikro. Perspektif fenomenologi dengan paradigma peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah ini akan memberi peluang individu sebagai subjek kajian melakukan interpretasi, dan kemudian pengkaji melakukan interpretasi terhadap interpretasi itu sampai mendapatkan pengetahuan ilmiah tentang peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, dalam hal ini Berger (dalam Subadi, 2011: 11) menyebutnya dengan *first order understanding* dan *second order understanding*.

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 2 Wonogiri yang terletak di Jln. Diponegoro 95 Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini dilaksanakan pada minggu kedua bulan Februari 2013 sampai bulan April 2013. Peneliti mengawali penelitian ini dengan observasi langsung dilokasi penelitian di SMP Negeri 2 Wonogiri Kabupaten Wonogiri. Waktu penelitian sampai dengan

penulisan laporan dilaksanakan selama tiga bulan dengan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 2 Wonogiri Kabupaten Wonogiri.

Strategi dan taktik penelitian yang digunakan adalah: Pertama-tama peneliti berusaha mengenal kondisi SMP Negeri 2 Wonogiri sebagai tempat penelitian yang telah ditetapkan baik secara geografis, keadaan ekonomi, sosial, budaya dan peran aktif masyarakat dalam dunia pendidikan. Strategi dan taktik penelitian ini hanya dapat diperoleh jika peneliti sebelumnya telah menyatu dan mampu berinteraksi dengan masyarakat setempat (informan penelitian), maka langkah yang ditempuh berikutnya adalah: penciptaan "*rapport*".

Dalam penelitian ini yang ditunjuk sebagai informan adalah semua guru di SMP Negeri 2 Wonogiri. Namun dikarenakan banyaknya guru, maka dalam penelitian ini peneliti menentukan sejumlah informan yang menurut peneliti dapat memberikan informasi berkaitan dengan penelitian tersebut. Sedangkan yang dimaksud key informan dalam penelitian ini adalah Kepala sekolah SMP Negeri 2 Wonogiri.

Selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan data penelitian kualitatif dengan langkah-langkah yaitu: metode observasi dan dokumentasi serta metode wawancara mendalam..

Penggunaan analisis data perspektif fenomenologi untuk memperoleh *first order understanding* adalah: Pertama, meminta peneliti aliran ini untuk menanyakan kepada pihak yang diteliti guna mendapatkan penjelasan yang benar terkait dengan; (1) peran komite sekolah dalam penyelenggaraan manajemen sarana prasarana, penyelenggaraan manajemen pendidikan, dan pembiayaan pendidikan. Kedua, informasi-informasi itu belum cukup bagi peneliti, maka selanjutnya peneliti harus menanyakan lebih lanjut. Ketiga, informasi-informasi itu belum cukup untuk menjawab permasalahan penelitian ini, kemudian peneliti berkewajiban untuk melakukan rekonstruksi dan interpretasi agar informasi yang satu dapat dijelaskan dalam pertaliannya dengan informasi yang lain sehingga akan diperoleh suatu makna yang baru. Makna yang baru inilah yang disebut *second*

*order understanding* dalam fenomenologi atau objektivasi menurut pemahaman Berger.

Dalam penelitian ini keabsahan data dilakukan dengan uji validitas dan uji reabilitas instrumen. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas) (Sugiyono, 2007: 366).

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Peran Komite sekolah dalam Penyelenggaraan Manajemen Sarana dan Prasarana**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 2 Wonogiri yang terkait dengan peran komite sekolah dalam penyelenggaraan manajemen sarana dan prasarana, meliputi: membantu kepala sekolah menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana. Membantu kepala sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana. Bekerja sama dengan kepala sekolah dalam menyusun pertanggung jawaban pengadaan sarana dan prasarana. Membantu kepala sekolah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana. Memberikan masukan kepada kepala sekolah terkait dengan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana sekolah. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan sarana dan prasarana sekolah. Membantu kepala sekolah dalam mengamankan dan menyediakan tempat penyimpanan sarana dan prasarana sekolah. Menerima keluhan dari masyarakat khususnya orang tua siswa, maupun dari siswa secara langsung terkait dengan sarana prasarana sekolah. Membantu kepala sekolah dalam penghapusan sarana prasarana sekolah. Keterlibatan komite sekolah dalam menyusun perencanaan sarana prasarana merupakan bentuk partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Dalam hal ini komite sekolah telah menempatkan dirinya sebagai partner sekolah untuk mencapai tujuan

pendidikan. Kegiatan komite dalam menyusun perencanaan adalah menyampaikan usulan, pertimbangan, dan gagasan-gagasan terkait dengan kebutuhan pendidikan. Dengan demikian komite sekolah telah berperan sebagai “Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan”, seperti yang dikemukakan oleh Engkoswara (2010: 297), bahwa salah satu peran komite sekolah adalah sebagai Pemberi pertimbangan (*advisory agency*).

Sebagai wakil dari masyarakat aktivitas komite sekolah dalam membantu kepala sekolah untuk menyusun pertanggung jawaban pengadaan sarana dan prasarana diwujudkan dalam keikutsertaan ketua komite sekolah menandatangani pertanggung jawaban. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana sekolah khususnya untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak hanya dipertanggung jawabkan oleh kepala sekolah dan bendahara saja, namun masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah juga ikut bertanggung jawab atas penggunaan dana sekolah, sehingga komite sekolah ikut mengontrol penggunaan dana, dengan demikian komite sekolah telah berperan sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, seperti yang dikemukakan oleh Engkoswara (2010: 297).

Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana perlu dilakukan oleh sekolah, hal ini dimaksudkan agar sarana dan prasarana yang ada dapat mendukung mutu sekolah. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan yang bermutu merupakan fungsi komite sekolah agar lebih berperan terhadap tujuan pendidikan. Dengan demikian langkah komite sekolah dalam membantu kepala sekolah dalam memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana merupakan langkah yang tepat, walaupun aktivitas yang dapat dilakukan oleh komite sekolah baru sebatas memberi rekomendasi pihak ke III yang dapat melaksanakan perbaikan, dan melakukan pengawasan terhadap perbaikan.



Demikian halnya dengan aktivitas komite sekolah memberikan masukan kepada kepala sekolah terkait dengan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana sekolah, melakukan pengawasan terhadap penggunaan sarana dan prasarana sekolah, membantu kepala sekolah dalam mengamankan dan menyediakan tempat penyimpanan sarana dan prasarana sekolah, menerima keluhan dari masyarakat khususnya orang tua siswa, maupun dari siswa secara langsung terkait dengan sarana prasarana sekolah, dan membantu kepala sekolah dalam penghapusan sarana prasarana sekolah. Seluruh aktivitas komite sekolah tersebut merupakan perwujudan dari kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa adanya peran komite sekolah tersebut menunjukkan bahwa SMP Negeri 2 Wonogiri telah menerapkan prinsip desentralisasi pendidikan, dimana SMP Negeri 2 telah mampu menyusun program sendiri untuk diterapkan. Disamping itu sekolah telah menunjukkan kewenangannya dalam mengelola segala sarana dan prasarana yang tersedia, mengelola sumber daya manusia yang dimiliki, serta melibatkan kepedulian *stakeholders* dalam pelaksanaan pendidikan. Hal ini sesuai dengan pasal 31 UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang bermutu, dan juga untuk mencapai tujuan, maka diserahkan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah kepada pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam konsideran Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, model pengelolaan sekolah yang bernuansa Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah perlu diterapkan, yaitu konsep pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan mutu dan kemandirian sekolah, dan dengan manajemen berbasis sekolah diharapkan warga sekolah dan warga masyarakat setempat dapat melaksanakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan zaman dan tuntutan global.

Pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah oleh warga sekolah tidak akan maksimal jika kepala sekolah tidak memiliki kompetensi dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Walaupun komite sekolah memiliki peran yang aktif, namun jika kepala sekolah tidak memiliki kompetensi yang baik, tentunya tidak akan membawa hasil yang memuaskan, dan pengelolaan sarana prasarana tidak akan efektif. Dengan demikian jika sekolah menginginkan pengelolaan sarana dan prasarana dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan kompetensi kepala sekolah dan kinerja komite sekolah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Asiabaka (2008) yang menyimpulkan bahwa aktualisasi tujuan dan sasaran pendidikan membutuhkan penyediaan, pemanfaatan dan pengelolaan fasilitas yang tepat dan maksimum. Selain itu, manajer harus mengadopsi metode-metode modern manajemen fasilitas sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk meningkatkan kualitas belajar dan mengajar.

## **2. Peran Komite sekolah dalam Penyelenggaraan Manajemen Pendidikan**

Hasil penelitian tentang peran komite sekolah dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan di SMP Negeri 2 Wonogiri yang diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara meliputi: berpartisipasi dalam menyusun program tahunan. Memberikan masukan terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler. Berperan aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan. Berperan aktif dalam kegiatan evaluasi pembelajaran tengah semester, semester, ujian kenaikan kelas, maupun ujian sekolah. Membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasi terkait dengan pelaksanaan pendidikan. Ikut memecahkan berbagai permasalahan terkait dengan pendidikan. Merencanakan kebutuhan biaya pendidikan. Melakukan pengawasan terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah. Melakukan kontrol terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah yang

dilihat dari mutu output pendidikan. Sebagai mediator masyarakat dengan sekolah terkait dengan peningkatan mutu pendidikan.

Penyelenggaraan manajemen pendidikan diharapkan dapat memenuhi prinsip akuntabilitas. Prinsip ini dapat dicapai apabila sekolah mampu melaksanakan pendidikan dengan kinerja yang baik dengan kualitas hasil yang baik. Untuk mencapai prinsip tersebut SMP Negeri 2 Wonogiri telah melaksanakan pengelolaan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi bersama dengan komite sekolah. Perencanaan pendidikan dilakukan oleh sekolah bersama dengan komite sekolah dengan menyusun program tahunan. Program tahunan merupakan garis besar kebijakan yang akan dilaksanakan selama satu tahun, sehingga sudah sewajarnya jika komite sekolah sebagai wakil dari masyarakat ikut terlibat langsung dalam penyusunan program tahunan tersebut.

Adanya peran serta komite sekolah tersebut menunjukkan bahwa SMP Negeri 2 Wonogiri dalam mengelola sekolah telah menganut konsep demokratisasi sebagaimana dituangkan dalam UU Sisdiknas 2003 bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan (pasal 4) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (ayat 1). Dengan demokratisasi dalam dunia pendidikan maka komponen-komponen yang berhubungan langsung dengan proses pendidikan ikut berperan serta dalam mengembangkan dan meningkatkan program-program peningkatan kualitas pendidikan. Karena pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (ayat 3), serta dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya penyelenggaraan pendidikan dasar tidak cukup dikelola oleh pihak sekolah

saja, namun diperlukan keterlibatan pihak lain yaitu masyarakat dan pemerintah yang merupakan pengambil keputusan tingkat atas, karena pendidikan dasar merupakan pondasi dari pendidikan pada tingkat berikutnya. Dengan demikian penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Toremén (2008), yang menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan proses yang berkelanjutan yang harus diambil dari tingkat operasional kepada manajemen tingkat atas. Sekolah dasar, sebagai subsistem pendidikan dasar, mempengaruhi prestasi belajar siswa pada sekolah sekolah tingkat berikutnya. Jadi upaya TQM di sekolah dasar yang fundamental penting untuk mencapai sistem pendidikan yang berkualitas tinggi

### **3. Peran komite sekolah dalam pembiayaan pendidikan**

Peran komite sekolah dalam pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Wonogiri telah dimulai sejak komite sekolah dibentuk. Memberi masukan dalam penyusunan rencana anggaran baik RAPBS maupun rencana anggaran untuk pengembangan sekolah. Membantu dalam merencanakan sumber dana. Mengupayakan sumber dana lain selain dari pemerintah untuk keperluan pengembangan sekolah. Melakukan pengawasan penggunaan dana khususnya yang bersumber dari masyarakat. Melakukan pengawasan penggunaan anggaran sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan penggunaan biaya pendidikan. Membantu kepala sekolah dalam menyusun prioritas penggunaan biaya.

Peran Komite Sekolah dalam pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Wonogiri telah dimulai sejak komite sekolah dibentuk telah diwujudkan dalam berbagai kegiatan diantaranya memberi masukan dalam penyusunan rencana anggaran baik RAPBS maupun rencana anggaran untuk pengembangan sekolah, membantu dalam merencanakan sumber dana, mengupayakan sumber dana lain selain dari pemerintah untuk keperluan pengembangan

sekolah, melakukan pengawasan penggunaan dana khususnya yang bersumber dari masyarakat, melakukan pengawasan penggunaan anggaran sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan penggunaan biaya pendidikan, dan membantu kepala sekolah dalam menyusun prioritas penggunaan biaya.

Walaupun pendanaan sekolah saat ini tidak terfokus pada dana yang bersumber dari masyarakat, namun komite sekolah tetap menunjukkan perannya sebagai mitra kepala sekolah dalam menyusun rencana, menggunakan, mengawasi, menyusun laporan, dan mengevaluasi dana BOS yang disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian komite sekolah dalam hal pembiayaan sekolah secara nyata telah berperan aktif sejak perencanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah, ikut mengawasi setiap pengeluaran, membantu menyusun pertanggung jawaban, bahkan komite sekolah ikut serta menandatangani semua dokumen administrasi keuangan sekolah.

Keterlibatan komite sekolah dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dan orang tua siswa terhadap dukungan pembiayaan sekolah tersebut sangat dimungkinkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Weiyi Su (2012), yang menyimpulkan bahwa Sekolah dapat membentuk komite orang tua dalam rangka untuk memperkuat hubungan antara orang tua dan sekolah, menyelesaikan pendidikan berorientasi mutu termasuk kebutuhan keuangan, dan sekaligus mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Koross (2008), yang menyimpulkan bahwa keterlibatan orang tua sangat mempengaruhi cara keuangan di sekolah dikelola, tingkat keterlibatan orangtua di bidang keuangan sekolah mempengaruhi transparansi keuangan di sekolah.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa peran komite sekolah dalam penyelenggaraan manajemen sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 2 Wonogiri yaitu memberi pertimbangan (*advisory agency*) dengan memberikan pertimbangan dalam penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengadaan sarana dan prasarana penyusunan pertanggungjawaban pengadaan sarana dan prasarana, dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana. Berperan sebagai Pendukung (*supporting agency*), berupa kegiatan memberi dukungan terhadap optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana sekolah. Sebagai Pengontrol (*controlling agency*), dengan melaksanakan kegiatan melakukan pengawasan terhadap penggunaan sarana dan prasarana. Dan sebagai mediator, dengan melakukan kegiatan menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa dan orang tua terkait dengan sarana prasarana. Namun dalam hal ini komite sekolah belum melaksanakan mediasi pemerintah dengan sekolah dan masyarakat.

Peran komite sekolah dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan di SMP Negeri 2 Wonogiri meliputi partisipasinya dalam penyusunan program tahunan. Pemberian masukan terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler untuk memupuk tingkat kreativitas siswa. Peran aktif komite sekolah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan. Komite sekolah juga mempunyai peran aktif dalam kegiatan evaluasi pembelajaran tengah semester, semester, ujian kenaikan kelas, dan ujian sekolah. Komite sekolah sebagai perantara penyampaian aspirasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan pendidikan. Dalam proses pemecahan berbagai permasalahan yang terkait dengan pendidikan komite sekolah selalu ikut berperan aktif. Peran aktif komite sekolah dalam merencanakan kebutuhan biaya pendidikan. Dalam melakukan pengawasan terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, pihak komite sekolah selalu diikutsertakan. Keberhasilan pendidikan di sekolah dilihat dari mutu output pendidikan dengan cara melakukan kegiatan monitoring dan kontrol.

Komite sekolah juga berperan sebagai mediator masyarakat dengan pihak sekolah terkait dengan peningkatan mutu pendidikan.

Peranan komite sekolah dalam pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Wonogiri telah dimulai sejak komite sekolah dibentuk. Pemberian masukan dalam penyusunan rencana anggaran baik RAPBS maupun rencana anggaran untuk pengembangan sekolah. Peran komite sekolah dalam merencanakan sumber dana. Mengupayakan sumber dana lain selain dari pemerintah untuk keperluan pengembangan sekolah. Melakukan pengawasan penggunaan dana khususnya yang bersumber dari masyarakat. Melakukan pengawasan penggunaan anggaran sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan penggunaan biaya pendidikan. Membantu kepala sekolah dalam menyusun prioritas penggunaan biaya.

Hasil penelitian ini dapat diimplikasi bahwa Jika komite sekolah secara aktif membantu kepala sekolah dalam menyelenggarakan manajemen sarana dan prasarana, maka penggunaan sarana dan prasarana sekolah dapat dioptimalkan. Jika komite sekolah berperan aktif dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan, maka kualitas pendidikan dapat meningkat. Jika komite sekolah berperan dalam penyelenggaraan pembinaan pendidikan, maka dapat mendukung biaya operasional sekolah.

Penelitian ini memberikan saran kepada komite sekolah, sebaiknya komite sekolah dalam melaksanakan peran dan fungsinya tidak tergantung pada ketua, namun diperlukan keaktifan dari semua pengurus, selain itu peran mediator pemerintah dengan sekolah dan masyarakat baik dalam penyelenggaraan manajemen sarana prasarana, pendidikan, dan pembiayaan perlu ditingkatkan. Saran untuk kepala sekolah, sebaiknya kepala sekolah secara aktif melibatkan semua komite sekolah dalam setiap kegiatan sekolah, sehingga tidak hanya melibatkan ketua komite sekolah saja, selain itu ketidakaktifan anggota komite sekolah perlu dicarikan penyebab dan jalan keluar.

Saran bagi masyarakat atau orang tua siswa, penunjukan/pemilihan komite sekolah hendaknya benar-benar dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk berpartisipasi aktif terhadap penyelenggaraan pendidikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, dan Lia Yuliana, 2008, *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Penerbit Aditya Media

Engkoswara dan Aan Komariah, 2010, *Administrasi Pendidikan*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Miles, M.B dan Huberman, A.M. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjeptjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Subadi, Tjipto, 2011, *CONTOH BAB III METODE PENELITIAN dengan Judul Penelitian BORO DAN PROSESNYA (Suatu Kajian Sosial Mobilitas Penduduk dengan Menggunakan Teori Fenomenologi)*, <http://tjiptosubadi.blogspot.com/011/01/contoh-bab-iii-metode-penelitian.html>

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta;

Suparlan, 2007, *Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Ada Apa Denganmu?* (<http://www.suparlan.com/pages/post/dewan-pendidikan-dan-komite-sekolah-ada-apa-denganmu135.php>) diakses 22 Januari 2009

Toremen, Fatih, and Mehmet Karakus, 2008, *Total quality management practices in Turkish primary schools*, Quality Assurance in Education, [www.emeraldinsight.com](http://www.emeraldinsight.com)

Weiyi Su, and Mengting Deng, 2012, *Survey and Thought of Financial Management and Education in High School Students in Nanjing*, Scientific Research, [www.SciRP.org/journal/ce](http://www.SciRP.org/journal/ce)